



**SALINAN**

**KOMISI INFORMASI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**PUTUSAN**

**Nomor : 002/KINTB/PSI-KEP.2/II/2024**

**KOMISI INFORMASI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**1. IDENTITAS**

- (1.1) Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat yang menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik Nomor Registrasi **0023/KINTB/PSI-REG/XII/2023** yang diajukan oleh :

Nama : **Padli**

Alamat : Desa Sengkerang, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

**Terhadap**

Nama : **Desa Sengkerang Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah**

Alamat : Desa Sengkerang, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah

Di dalam persidangan dihadiri oleh SULTAN, Kaur Pemerintahan Desa Sengkerang Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah. Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

- (1.2) Telah membaca permohonan Pemohon;  
Telah memeriksa surat-surat dari Pemohon;  
Telah memeriksa surat-surat Termohon;  
Telah mendengar keterangan Pemohon;



Telah mendengar keterangan Termohon;  
Telah mendengar keterangan Saksi;  
Telah mendengar kesimpulan Pemohon;  
Telah mendengar kesimpulan Termohon.

## 2. DUDUK PERKARA

### A. Pendahuluan

(2.1) Bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi Provinsi NTB tertanggal 12 Desember 2023 dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi NTB pada tanggal 18 Desember 2023 dengan Registrasi Sengketa Nomor : 023/KINTB/PSI-REG/XII/2023.

### Kronologi

(2.2) Bahwa Pemohon mengajukan permohonan informasi melalui surat tertanggal 18 Oktober 2023 kepada Kepala Desa Sengkerang Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah. Adapun informasi yang diminta yaitu:

1. Salinan Dokumen Informasi APBDes Tahun Anggaran 2020, 2021, dan 2022.
2. Salinan Dokumen Informasi SPJ Tahun 2020, 2021, dan 2022.
3. Salinan Dokumen Informasi Keuangan BUMDES Tahun 2020, 2021, dan 2022.

(2.3) Bahwa Pemohon mengajukan keberatan kepada Kepala Desa Sengkerang melalui surat tertanggal 31 Oktober 2023.

(2.4) Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi Provinsi NTB pada tanggal 12 Desember 2023 dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi NTB pada tanggal 18 Desember 2023 dengan Registrasi Sengketa Nomor : 023/KINTB/PSI-REG/XII/2023.



- (2.5) Bahwa terhadap sengketa *a quo* telah dilakukan persidangan sebagai berikut :
1. Pada tanggal 16 Januari 2024 telah dilaksanakan sidang pertama, dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.
  2. Pada tanggal 24 Januari 2024 telah dilaksanakan sidang kedua, dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.
  3. Pada tanggal 31 Januari 2024 telah dilaksanakan sidang ketiga, dihadiri oleh Pemohon, Termohon dan para Saksi.
- (2.6) Bahwa terhadap sengketa *a quo* telah dilakukan mediasi pada tanggal 16 Januari 2024 dihadiri oleh Pemohon dan Termohon. Di dalam mediasi tersebut para pihak mencapai kesepakatan sebagian yaitu Termohon bersedia memberikan kepada Pemohon :
1. Salinan Dokumen Informasi APBDes Tahun Anggaran 2020, 2021, dan 2022;
  2. Salinan Dokumen Informasi Keuangan BUMDes Desa Sengkerang Tahun Anggaran 2022 dan 2023 dengan SPJnya.
- Sedangkan untuk Salinan Dokumen Informasi SPJ Tahun Anggaran 2020, 2021, dan 2022, dilanjutkan penyelesaiannya melalui sidang ajudikasi non litigasi.

#### **Alasan atau Tujuan Permohonan Informasi Publik**

- (2.7) Pemohon mengajukan permohonan Informasi Publik atas perkara *a quo* untuk mengetahui dan memahami pelaksanaan program pembangunan Desa Sengkerang dan pengelolaan anggarannya.



#### **Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik**

- (2.8) Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dalam perkara *a quo* karena Pemohon tidak memperoleh tanggapan dari Kepala Desa Sengkerang terhadap keberatan yang diajukan Pemohon.

## Petitum

(2.9) Pemohon memohon Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk memutus sengketa Informasi Publik *a quo* dengan petitum yaitu mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

## B. Alat Bukti

### Keterangan Pemohon

(2.10) Menimbang bahwa di dalam persidangan Pemohon menyampaikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon menyatakan permohonan penyelesaian sengketa informasi sebagai perseorangan.
2. Bahwa Pemohon menyatakan telah melakukan permohonan informasi melalui surat tertanggal 18 Oktober 2023 kepada Kepala Desa Sengkerang.
3. Bahwa Pemohon menyatakan telah mengajukan keberatan melalui surat tertanggal 31 Oktober 2023 kepada Kepala Desa Sengkerang.
4. Bahwa Pemohon menyatakan tidak memperoleh tanggapan dari Termohon terhadap keberatan yang diajukan Pemohon.
5. Bahwa Pemohon menyatakan informasi yang diminta berupa SPJ yang lengkap dengan kwitansinya.

### Surat-Surat Pemohon

(2.11) Menimbang Bahwa Pemohon mengajukan surat sebagai berikut:

Surat P-1	Fotocopy Surat Permohonan Informasi tertanggal 18 Oktober 2023 kepada Kepala Desa Sekerang Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah.
Surat P-2	Fotocopy Tanda Terima Surat Permohonan Informasi tanggal 18 Oktober 2023.
Surat P-3	Fotocopy Surat Keberatan tertanggal 31 Oktober 2023 kepada Kepala Desa Sengkerang.
Surat P-4	Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 5202060107950300 atas nama Padli.



Surat P-5	Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 52020622117900002 atas nama Hamzanwadi.
Surat P-6	Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Januari 2024 kepada Hamzanwadi.

### Keterangan Termohon

(2.12) Menimbang bahwa di dalam persidangan Termohon menyampaikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon menyatakan telah menerima surat permohonan informasi dan surat keberatan Pemohon.
2. Bahwa Termohon menyatakan belum memahami Keterbukaan Informasi Publik di Desa.
3. Bahwa Termohon menyatakan tidak ada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Pemerintah Desa Sengkerang.
4. Bahwa Termohon menyatakan belum dapat memberikan informasi Dokumen SPJ Pembelanjaan Desa Sengkerang, karena harus konsultasi terlebih dahulu dengan instansi pembina.



### Surat-Surat Termohon

(2.13) Bahwa Termohon mengajukan surat sebagai berikut:

Surat T-1	Surat Kuasa dari Kepala Desa Sengkerang Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah
Surat T-2	Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 5202060107720591 atas nama Sultan
Surat T-3	Surat Kuasa tertanggal 16 Oktober 2023 kepada Sultan

## Keterangan Saksi

(2.14) Menimbang bahwa didalam persidangan saksi Sekertaris Desa Sengkerang, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah menyampaikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi menyatakan selaku Sekertaris Desa Sengkerang ikut mengawasi pengelolaan keuangan Desa.
2. Bahwa saksi menyatakan SPJ Pembelanjaan Anggaran Desa terdiri dari Surat Perintah Membayar (SPP), Rekapitulasi SPJ dan Kwitansi Pengeluaran.
3. Bahwa Saksi menyatakan dokumen SPJ disimpan di bendahara Desa.
4. Bahwa Saksi menyatakan dokumen SPJ diketahui oleh Kepala Desa, BPD, dan Bendahara.

### 3. KESIMPULAN PARA PIHAK

- (3.1) Menimbang bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan sebagai berikut:  
Pemohon meminta kepada Termohon untuk dapat memberikan dokumen informasi yang diminta Pemohon sebagai bahan diskusi dengan masyarakat.
- (3.2) Menimbang bahwa Termohon menyampaikan kesimpulan belum dapat memberikan informasi SPJ yang diminta Pemohon karena harus konsultasi dengan instansi terkait.



### 4. PERTIMBANGAN HUKUM

- (4.1) Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c, Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) *juncto* Pasal 5 huruf b dan Pasal 13 huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP).

- (4.2) Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Majelis Komisioner mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:
1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk memeriksa dan memutus permohonan *a quo*;
  2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi;
  3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi;
  4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik.

Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis mempertimbangkan dan memberikan pendapat sebagai berikut:

#### **A. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat**

- (4.3) Menimbang bahwa Komisi Informasi Provinsi mempunyai dua kewenangan yaitu kewenangan absolut dan kewenangan relatif.

##### **Kewenangan Absolut**

- (4.4) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 1 angka 4 dan Pasal 23 UU KIP** dinyatakan:

Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan UU KIP dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi.



- (4.5) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 1 angka 2 UU KIP** dinyatakan bahwa:

Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

- (4.6) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 1 angka 5 UU KIP juncto Pasal 1 angka 3 Perki PPSIP** dinyatakan bahwa:  
Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara Badan Publik dengan Pemohon Informasi Publik dan/atau Pengguna Informasi Publik yang

berkaitan dengan hak memperoleh dan/atau menggunakan Informasi Publik berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(4.7) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan:

**Pasal 1 Perki PPSIP:**

**Angka 6**

Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Permohonan adalah upaya penyelesaian sengketa yang diajukan oleh Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi sesuai dengan Peraturan ini.

**Angka 7**

Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Pemohon adalah Pemohon atau Pengguna Informasi Publik yang mengajukan Permohonan kepada Komisi Informasi.

**Angka 8**

Termohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Termohon adalah Badan Publik yang diwakili oleh Pimpinan Badan Publik, atasan PPID, atau pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan untuk mengambil keputusan dalam penyelesaian sengketa di Komisi Informasi.

**Angka 9**

Ajudikasi adalah proses penyelesaian Sengketa Informasi Publik antara para pihak di dalam persidangan yang diputus oleh Komisi Informasi.

**Pasal 26 ayat (1) huruf a UU KIP**

Komisi Informasi bertugas: menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap Pemohon Informasi Publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam UU KIP.



(4.8) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 5 Perki PPSIP** dinyatakan bahwa:

Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Komisi Informasi dapat ditempuh apabila:

- a. Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PPID; atau
- b. Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan diterima oleh atasan PPID.

- (4.9) Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf (4.4) sampai paragraf (4.8) Majelis berpendapat bahwa yang menjadi kewenangan absolut Komisi Informasi adalah menyangkut dua hal, yakni:
- Adanya permohonan informasi, keberatan dan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi;
  - Sengketa yang diajukan adalah Sengketa Informasi Publik yang terjadi antara Pemohon dengan Badan Publik.
- (4.10) Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf (4.4) sampai dengan Paragraf (4.9) terkait kewenangan absolut Majelis berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki kewenangan absolut untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara *a quo*.
- (4.11) Menimbang bahwa berdasarkan paragraf (4.9) huruf b, dalam hal penentuan apakah *sengketa a quo* adalah sengketa antara Pemohon Informasi Publik dan Badan Publik, Majelis akan menilai terlebih dahulu dengan memeriksa kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dan Termohon yang diuraikan dalam **Bagian B dan C**.

### **Kewenangan Relatif**

- (4.12) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan:

#### **Pasal 27 ayat (3) UU KIP**

Kewenangan Komisi Informasi Provinsi meliputi kewenangan penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi yang bersangkutan.

#### **Pasal 6 Perki PPSIP**

##### **Ayat (2)**

Komisi Informasi Provinsi berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi.

##### **Ayat (4)**

Dalam hal Komisi Informasi Kabupaten/Kota belum terbentuk, kewenangan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat kabupaten/kota dilaksanakan oleh Komisi Informasi Provinsi.



- (4.13) Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 1 angka 3 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa (Perki SLIP Desa), Badan Publik Desa adalah:  
Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Badan Usaha Milik Desa dan Badan Kerjasama Antar Desa.
- (4.14) Menimbang bahwa Termohon adalah Kepala Desa Sengkerang, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, dalam hal ini disebut sebagai badan publik berdasarkan UU KIP dan Perki SLIP Desa, sehingga Termohon merupakan Badan Publik pada ketentuan Pasal 1 angka 3 UU KIP *juncto* Pasal 3 ayat (1) huruf *d* Perki SLIP dan Pasal 1 angka 3 Perki SLIP Desa.
- (4.15) Menimbang bahwa Termohon adalah Desa Sengkerang, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, tunduk dan diatur dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- (4.16) Menimbang bahwa Termohon dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, menggunakan anggaran yang bersumber dari APBN dan APBD sehingga menguatkan Termohon sebagai Badan Publik sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 3 UU KIP.
- (4.17) Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf (4.12) sampai dengan paragraf (4.16), Majelis berpendapat Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki kewenangan relatif untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara *a quo*.



#### **B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

- (4.18) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12, Pasal 22 ayat (1), Pasal 35 ayat (1) huruf *c*, Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) UU KIP *juncto* Pasal 1 angka 7 dan Pasal 5 Perki PPSIP pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik yang mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi setelah terlebih dahulu menempuh upaya permohonan informasi dan keberatan kepada Termohon;

(4.19) Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan, Pemohon dalam sengketa informasi *a quo* merupakan Perseorangan berdasarkan bukti surat P-4 dan keterangan Pemohon dalam persidangan;

(4.20) Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan, Pemohon dalam sengketa informasi *a quo* telah menempuh upaya pengajuan permohonan informasi dan keberatan kepada Termohon;

(4.21) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 12 UU KIP dan Pasal 1 angka 7, Pasal 11 ayat (1) Perki PPSIP mengatur:

**Pasal 1 angka 12 UU KIP**

Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

**Pasal 1 angka 7 Perki PPSIP**

Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Pemohon adalah Pemohon atau Pengguna Informasi Publik yang mengajukan Permohonan kepada Komisi Informasi.

(4.22) Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dalam paragraf (4.18) sampai dengan paragraf (4.21), Majelis Komisioner berpendapat Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*).



**C. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon**

(4.23) Menimbang bahwa Pasal 1 angka 8 Perki PPSIP menyatakan bahwa:

Termohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Termohon adalah Badan Publik yang diwakili oleh Pimpinan Badan Publik, atasan PPID, atau pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan untuk mengambil keputusan dalam penyelesaian sengketa di Komisi Informasi.

(4.24) Menimbang bahwa kedudukan Termohon sebagai Badan Publik telah diuraikan pada paragraf (4.12) sampai dengan paragraf (4.17), sehingga berlaku *mutatis mutandis* dalam menguraikan dan mempertimbangkan kedudukan hukum Termohon sebagaimana dimaksud pada bagian ini.

(4.25) Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf (4.23) dan paragraf (4.24) diatas, Majelis berpendapat Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Termohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dalam sengketa *a quo*.

#### **D. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi**

(4.26) Menimbang ketentuan-ketentuan mengenai jangka waktu dalam prosedur penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagai berikut:

##### **Pasal 22 UU KIP:**

##### **Ayat (1)**

“Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh Informasi Publik kepada Badan Publik terkait secara tertulis atau tidak tertulis.”

##### **Ayat (7)**

“Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Badan Publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan :

- a. informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya ataupun tidak;
- b. Badan Publik wajib memberitahukan Badan Publik yang menguasai informasi yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada dibawah penguasaannya dan Badan Publik yang menerima permintaan mengetahui keberadaan informasi yang diminta;
- c. penerimaan atau penolakan permintaan dengan alasan yang tercantum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
- d. dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan materi informasi yang akan diberikan;
- e. dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, maka informasi yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan dan materinya;
- f. alat penyampai dan format informasi yang akan diberikan; dan/ atau
- g. biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta.”

##### **Ayat (8)**

“Badan Publik yang bersangkutan dapat memperpanjang waktu untuk mengirimkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), paling lambat 7 (tujuh) hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan secara tertulis.”

##### **Pasal 35 UU KIP:**

(1) Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berdasarkan alasan berikut:

- a. penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
- b. tidak disediakannya informasi berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;
- c. tidak ditanggapinya permintaan informasi;
- d. permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;
- e. tidak dipenuhinya permintaan informasi;
- f. pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau
- g. penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam Undang-Undang ini.

**Pasal 36 UU KIP:**

**Ayat (1)**

“Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1).”

**Ayat (2)**

“Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis.”

**Pasal 37 ayat (2) UU KIP**

“Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2).”



**Pasal 13 Perki PPSIP**

Permohonan diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak:

- a. tanggapan tertulis atas keberatan dari atasan PPID diterima oleh Pemohon; atau
- b. berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja untuk atasan PPID dalam memberikan tanggapan tertulis.

(4.27) Menimbang bahwa berdasarkan uraian **Kronologi** Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi *a quo* pada paragraf (2.2) sampai dengan paragraf (2.4) Pemohon telah menempuh mekanisme permohonan informasi, mengajukan keberatan dan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi.

(4.28) Menimbang bahwa berdasarkan uraian Kronologi Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi *a quo* pada paragraf (2.2) sampai dengan paragraf (2.4) Majelis berpendapat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi yang diajukan Pemohon telah memenuhi jangka waktu.

#### **E. Pokok Permohonan**

(4.29) Menimbang bahwa pokok permohonan dalam perkara *a quo* sesungguhnya adalah Sengketa Informasi Publik antara Pemohon dan Termohon mengenai informasi yang dimohonkan Pemohon kepada Termohon sebagaimana diuraikan pada **Bagian A Kronologi** paragraf (2.2).

#### **F. Pendapat Majelis**

(4.30) Menimbang bahwa berdasarkan surat permohonan informasi Pemohon diperoleh fakta hukum bahwa informasi yang diminta oleh Pemohon adalah sebagaimana diuraikan pada **Bagian A Kronologi** paragraf (2.2), yaitu:

1. Salinan Dokumen Informasi APBDes Tahun Anggaran 2020, 2021, dan 2022.
2. Salinan Dokumen Informasi SPJ Tahun 2020, 2021, dan 2022.
3. Dokumen Informasi Keuangan BUMDes Desa Sengkerang Tahun 2022 dan 2023 dengan SPJnya.



(4.31) Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf (2,6) terhadap sengketa *a quo* telah dilakukan mediasi pada tanggal 16 Januari 2024 yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon. Dalam mediasi tersebut para pihak telah sepakat bahwa Termohon bersedia memberikan :

1. Salinan Dokumen Informasi APBDes Desa Sengkerang Tahun Anggaran 2020, 2021, dan 2022.

2. Salinan Dokumen Informasi Keuangan BUMDes Desa Sengkerang, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok tengah Tahun Anggaran 2022 dan 2023, beserta SPJnya.

(4.32) Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf (2.6) dalam mediasi pada tanggal 16 Januari 2024 Termohon tidak bersedia memberikan Salinan Dokumen Informasi SPJ Tahun Anggaran 2020, 2021, dan 2022.

Terhadap Dokumen Informasi tersebut majelis akan mempertimbangkan, apakah dokumen tersebut merupakan informasi publik yang bersifat terbuka atau informasi yang dikecualikan dan apakah informasi tersebut dapat diberikan kepada Pemohon atau tidak?

(4.33) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 2 UU KIP menyatakan bahwa:

1. Setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik.
2. Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas.

(4.34) Menimbang bahwa berdasarkan UU KIP Pasal 4 menyatakan bahwa:

1. Setiap orang berhak memperoleh informasi publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.
2. Setiap orang berhak :
  - a. Melihat dan mengetahui Informasi Publik;
  - b. Menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh Informasi Publik;
  - c. Mendapatkan Salinan Informasi Publik melalui permohonan sesuai dengan Undang-Undang ini, dan/atau
  - d. Menyebarkan Informasi Publik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.



(4.35) Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 27 ayat (2) menyatakan bahwa “Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala Desa berwenang:

- d. menetapkan Peraturan Desa;
- e. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

(4.36) Menimbang bahwa sesuai Pasal 26 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyatakan bahwa “Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala Desa berkewajiban:

- f. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
- p. memberikan informasi kepada masyarakat Desa.

(4.37) Menimbang bahwa sesuai Pasal 24 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyatakan bahwa:

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan asas:

- d. keterbukaan;
- k. partisipatif.

(4.38) Menimbang bahwa sesuai ketentuan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa Pasal 2 Ayat (1) menyatakan bahwa, “Setiap Pemerintah Desa wajib mengumumkan secara berkala Informasi Publik Desa yang paling sedikit terdiri atas:

- e. peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun berjalan;
- f. Laporan Kinerja Pemerintah Desa yang meliputi paling sedikit:
  1. laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir tahun anggaran; dan/atau
  2. laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir masa jabatan;
  9. Laporan Keuangan Pemerintah Desa yang paling sedikit terdiri atas :
    1. Laporan Realisasi APBDes
    2. Laporan Realisasi Kegiatan
    3. Kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksana
    4. Sisa Anggaran



(4.39) Menimbang bahwa berdasarkan Perki Nomor 1 Tahun 2018, tentang SLIP Desa pasal 4 menyatakan, setiap Pemerintah Desa wajib menyediakan Informasi Publik Desa yang wajib tersedia setiap saat, paling sedikit terdiri atas :

- f. Surat Perjanjian dengan Pihak ketiga;
- h. Data Pembendaharaan atau Inventaris;
- n. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa, dan

o. Standar Operasional Prosedur Pengelolaan BUM Desa.

(4.40) Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf (4,31) sampai dengan paragraf (4.39), majelis berpendapat bahwa Dokumen Informasi SPJ Desa Sengkerang Tahun Anggaran 2020, 2021, dan 2022 adalah merupakan Informasi Publik, yang bersifat terbuka.

## 5. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

1. Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus permohonan *a quo*.
2. Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.
3. Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Badan Publik dalam sengketa *a quo*.
4. Batas waktu Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dalam sengketa *a quo* telah memenuhi jangka waktu.
5. Permohonan Pemohon beralasan hukum dan informasi yang dimohonkan oleh Pemohon adalah informasi publik yang bersifat terbuka.



## 6. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

6.1 Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

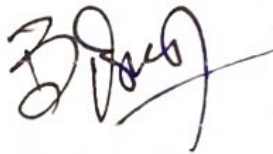
6.2 Memerintahkan kepada Termohon untuk memberikan :

1. Dokumen Informasi SPJ Desa Sengkerang Tahun Anggaran 2020, 2021, dan 2022, dengan cara melihat dan mencatat.

kepada Pemohon sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner **Badrun AM** selaku Ketua merangkap Anggota, **M. Zaini** dan **Sansuri** masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Senin, tanggal 5 Februari 2024** dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 21 Februari 2024** oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh **Suratni** sebagai Petugas Kepaniteraan, dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis



(**Badrun AM**)

Anggota Majelis



(**M. Zaini**)

Anggota Majelis



(**Sansuri**)

Petugas Kepaniteraan



(**Suratni**)

Untuk salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Mataram, 21 Februari 2024

Petugas Kepaniteraan



(**Suratni**)